

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN TUNA SOSIAL DAN  
ORANG TERLANTAR PERSPEKTIF *MAQASYID SYARIAH*  
(Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Tegal)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
RISKA SEPTIANA PUTRI  
19103070037**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

**Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Di Indonesia, Pengemis gelandangan dan anak jalanan merupakan kelompok rentan yang sering kali menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Tegal mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 yang bertujuan untuk melindungi dan memfasilitasi reintegrasi pengemis gelandangan dan anak jalanan ke dalam masyarakat. Upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dilakukan melalui Dari latar belakang yang telah peneliti kemukakan diatas, maka peneliti merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar dan Bagaimana Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal terhadap Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar perspektif *Maqasyid syari'ah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis yaitu memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan kebijakan dinas sosial yang didasarkan pada peraturan daerah Kabupeten Tegal no 4 tahun 2020 tentang penanganan tuna sosial dan orang terlantar, yang kemudian di analisis dengan teori kebijakan publik dan *maqasyid syariah*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Metode yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar telah mmemberikan panduan yang sistematis dan komprehensif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program penanganan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan. Dinas Sosial Kabupaten Tegal memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat dalam melaksanakan kebijakan Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar. Selain itu, Dampak Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar dari perspektif *Maqasid Syari'ah* menunjukkan komitmen pemerintah daerah serta mencerminkan prinsip-prinsip *Maqasid Syari'ah*, yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta melindungi dan mempromosikan kesejahteraan mereka.

**Kata kunci** :Implementasi, Tuna Sosial, dan Dinas Sosial Kabupaten Tegal

## ABSTRACT

In Indonesia, beggars, street dwellers, and street children are vulnerable groups that often face various social, economic, and security challenges. To address these issues, the Government of Tegal Regency issued Regional Regulation No. 4 of 2020 aimed at protecting and facilitating the reintegration of beggars, street dwellers, and street children into society. Prevention, rehabilitation, and social reintegration efforts are carried out through the background described by the researcher above, the researcher formulates two main issues, namely: How is the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2020 on the Handling of Social Welfare and Homeless People in Tegal Regency, and What is the policy of the Tegal Regency Social Services Agency regarding the handling of social welfare and homeless people from the perspective of Maqasid Sharia.

This research is a field research. The nature of this research is descriptive-analytical, which provides an overview and analysis of the implementation of social services policies based on the Tegal Regency Regional Regulation No. 4 of 2020 on the handling of social welfare and homeless people, which is then analyzed with public policy theory and Maqasid Sharia. The approach used in this research is empirical-juridical, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The methods used are interviews, observations, documentation, and data analysis.

The research findings indicate that the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2020 on the Handling of Social Welfare and Homeless People in Tegal Regency has provided a systematic and comprehensive guide to planning, implementing, and evaluating programs for the handling of beggars, street dwellers, and street children. The Tegal Regency Social Services Agency has a clear and strong legal foundation in implementing the policy on the handling of social welfare and homeless people. Additionally, the impact of the Tegal Regency Social Services Agency's policy in handling social welfare and homeless people from the perspective of Maqasid Sharia shows the commitment of the local government and reflects the principles of Maqasid Sharia, which emphasize the importance of fulfilling basic human needs and protecting and promoting their welfare.

**Keywords:** Implementation, Social Welfare, Tegal Regency Social Services Agency



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riska Septiana Putri  
NIM : 19103070052  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar Perspektif *Maqasyid syariah* (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Tegal)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 mei 2023  
Yang menyatakan

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag  
NIP: 19720903 199803 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-729/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR PERSPEKTIF *MAQASYID* SYARIAH (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Tegal)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKA SEPTIANA PUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070037  
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6493bed18e5a6



Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6493a609e15a4



Penguji II

Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 648f01c28b92d



Yogyakarta, 13 Juni 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6493cf4201d36

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Septiana Putri

NIM : 19103070037

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar Perspektif Maqasyid Syari’ah (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Tegal)”** adalah hasil penelitian/karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Juni 2023



Riska Septiana Putri

19103070037

STATE ISLAMIC UNIVERSITAS  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB**

### **SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Septiana Putri  
Tempat dan tanggal lahir : Tegal, 24 Agustus 2001  
NIM : 1910307037  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jalan Karangmulya, Bojong, Kabupaten Tegal,  
jawa tengah  
No. handphone : 082324778236

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk keperluan ijazah saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 07 juni2023

Pembuat Pernyataan,



Riska Septiana Putri



**MOTTO**

Salah satu pekerjaan terpenting manusia yang membuatnya ditandai sebagai makhluk bernama manusia adalah berfikir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan menuju penyelesaian skripsi ini, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada semua individu yang telah memberikan kontribusi berharga kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, saya persembahkan skripsi ini untuk:

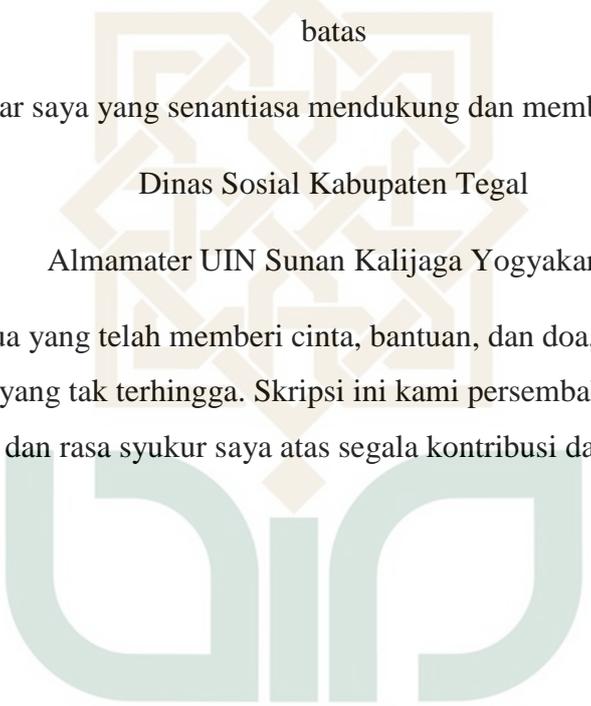
Kedua orang tua saya, Bapak Mas'ud dan Ibu Juinah yang kesabarannya tiada  
batas

Keluarga besar saya yang senantiasa mendukung dan memberi banyak nasihat

Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

"Kepada semua yang telah memberi cinta, bantuan, dan doa, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Skripsi ini kami persembahkan sebagai tanda penghormatan dan rasa syukur saya atas segala kontribusi dan dukungan kalian."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | bâ'  | B                  | Be                          |
| ت          | tâ'  | T                  | Te                          |
| ث          | śâ'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | ḥâ'  | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | khâ' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dâl  | D                  | De                          |
| ذ          | Żâl  | Ż                  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر          | râ'  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Şad  | Ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dâd  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭâ'  | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓâ'  | Ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain   | ' | Koma terbalik di atas |
| ح | Gain   | G | Ge dan ha             |
| ف | fâ'    | F | Ef                    |
| ق | Qâf    | Q | Qi                    |
| ك | Kâf    | K | Ka                    |
| ل | Lâm    | L | El                    |
| م | Mîm    | M | Em                    |
| ن | Nûn    | N | En                    |
| و | Wâwû   | W | We                    |
| ه | hâ'    | H | Ha                    |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof              |
| ي | yâ'    | Y | Ye                    |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |

## C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mâ'idah</i> |
| اسلامية | Ditulis | <i>Islâmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

|                |         |                              |
|----------------|---------|------------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqâranah al-ma zâhib</i> |
|----------------|---------|------------------------------|

3. Bila Ta’ marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

|           |         |                       |
|-----------|---------|-----------------------|
| زكاة لغير | Ditulis | <i>Zakâh al-fitri</i> |
|-----------|---------|-----------------------|

#### D. Vocal Pendek

|    |      |         |                    |                     |
|----|------|---------|--------------------|---------------------|
| 1. | فعل  | Fathah  | Ditulis<br>Ditulis | A<br><i>fa’ala</i>  |
| 2. | ذكر  | Kasrah  | Ditulis<br>Ditulis | I<br><i>Žukira</i>  |
| 3. | يذهب | dhammah | Ditulis<br>Ditulis | U<br><i>Yazhabu</i> |

#### E. Vokal Panjang

|    |                               |                    |                        |
|----|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>إستحسان      | Ditulis<br>Ditulis | Â<br><i>Istihsân</i>   |
| 2. | Fathah + ya’ mati<br>أنتى     | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br><i>Unsā</i>       |
| 3. | Kasrah + yā’ mati<br>العنوانى | Ditulis<br>Ditulis | Ī<br><i>al-’Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah + wāwu                 | Ditulis            | Ū                      |

|  |              |         |       |
|--|--------------|---------|-------|
|  | mati<br>علوم | Ditulis | 'Ulūm |
|--|--------------|---------|-------|

#### F. Vokal Rangkap

|    |                            |                    |                |
|----|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati<br>غيرهم | Ditulis<br>Ditulis | Ai<br>Gairihim |
| 2. | Fathah + wawu mati<br>قول  | Ditulis<br>Ditulis | Au<br>Qaul     |

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم      | Ditulis | A'antum         |
| أعدت      | Ditulis | U'iddat         |
| لئن شكرتم | Ditulis | La'in syakartum |

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur'ân |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyâs  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

|         |         |            |
|---------|---------|------------|
| الرسالة | Ditulis | Ar-Risālah |
| النساء  | Ditulis | An-Nisā'   |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl al-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

على والد سلام والد صلاة, والدين الدين يا امور على ن س ت ع ين و به , لم ين ال عارب لله الحمد  
ب عد اما , اجمع ين و صد به اله وعلى , س ل ين وال مر الات ب ياء اشرف

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesempatan, dan kasih sayangnya sehingga penulis memiliki kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam sejahtera kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sosok teladan mulia yang menjadi cahaya bagi umat manusia dan kita nantikan syafaatnya, Serta kepada para keluarga, para sahabat. Semoga keberkahan dan kebaikan senantiasa tercurah kepada mereka

Dalam proses penyusunan hingga menyelesaikan skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR PERSPEKTIF *MAQASYID SYARIAH* (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Tegal)” merupakan bentuk pemenuhan dalam melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tentunya penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai dengan baik apabila tanpa arahan dan bimbingan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait.

Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak terkait yang telah meluangkan waktu, energi, dan pengetahuan yang berharga untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, dorongan, dan masukan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
5. Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M.
6. DR. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing Akademik yang membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Moh. Tamtowi M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang dmembimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas keikhlasan, dorongan, dan masukan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
8. Staf Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memudahkan berbagai

urusan administrasi berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi.

9. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing serta memberikan pengajaran dalam hal keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Staff bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang telah memberikan informasi penting terkait penelitian
11. Bapak Makmur selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.
12. Bapak Ali Mahmudin dan Bapak Arif Triyono selaku Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, informasi penting di Lapangan kepada penulis sehingga, dapat menyelesaikan penelitian ini.
13. Kedua orang tua penulis, Bapak Mas'ud dan Ibu Juinah terima kasih telah menjadi sumber inspirasi, dukungan, dan kekuatan sepanjang hidup. Kalian memberikan kasih sayang dan kesabaran yang tak terbatas dan pedoman yang bijaksana.

Segala keberhasilan adalah hasil dari doa, dan restu kalian. Saya akan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, menghormati nilai-nilai yang kalian ajarkan, dan menjaga kepercayaan yang kalian berikan.

14. Ketiga saudara saya, Mas reza, Mas iih, dan Nofa yang selalu mendukung, menghibur, dan memberikan semangat di sepanjang hidup saya.

15. Sahabat dekat saya, Mega, Kartika, Dian, Ulima, Nabila, Vivi, Yunita, Dela, Azmi yang senantiasa menghibur, mendampingi, memberikan semangat dan banyak sekali bantuan baik teknis maupun moral selama mengerjakan skripsi, dan juga teruntuk kawan-kawan Hukum Tata Negara yang telah kebersamai selama empat tahun terakhir ini.

16. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, kontribusi kalian telah memberikan dampak yang signifikan dalam kelancaran dan kesuksesan penulisan skripsi ini.

Semoga semua kontribusi yang telah diberikan menjadi amal baik yang mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan harapan tersebut, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

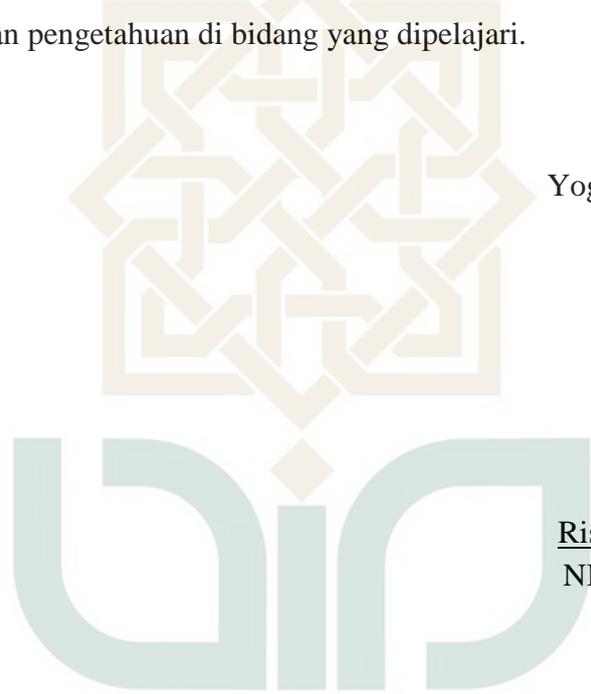
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Masukan yang konstruktif akan sangat berarti bagi penulis dalam memperbaiki dan mengembangkan karya ini di masa depan. Penulis meyakini bahwa dengan bantuan dan dorongan dari semua pihak, skripsi ini dapat terus diperbaiki dan berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Semoga karya ini menjadi bagian dari upaya kita semua dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang yang dipelajari.

Yogyakarta, 24 Mei 2023

Penyusun



Riska Septiana Putri  
NIM. 19103070037



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>ii</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....                                 | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | <b>iv</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI</b> .....                          | <b>v</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB</b> .....                           | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                                       | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....                          | <b>ix</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | <b>xxii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>xxiii</b> |
| <br>   |              |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....   | 3            |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                | 4            |
| D. Kegunaan Penlitian .....  | 4            |
| E. Telaah Pustaka .....  | 5            |
| F. Kerangka Teoritik .....   | 10           |
| G. Metode Penelitian .....   | 12           |
| H. Sistematika Pembahasan .....  | 16           |
| <br>   |              |
| <b>BAB II KONSEP TEORI KEBIJAKAN PUBLIK DAN MAQASYID SYARIAH</b> ..... | <b>18</b>    |
| A. Teori Kebijakan Publik .....  | 18           |
| B. <i>Maqasyid Syari'ah</i> .....                                      | 21           |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL,<br/>DAN PERDA KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2020<br/>TENTANG PENANGANAN TUNA SOSIAL DAN ORANG<br/>TERLANTAR.....</b> | <b>33</b>   |
| A. Dinas Sosial Kabupaten Tegal.....  | 33          |
| B. Pengertian Tuna Sosial dan orang terlantar serta Faktor pendukung dan<br>penghambat.....   | 60          |
| C. Perda Kabupaten Tegal nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan<br>Tuna Sosial dan Orang Terlantar.....  | 66          |
| <b>BAB IV ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL<br/>NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN TUNA<br/>SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR.....</b>                                  | <b>75</b>   |
| A. Implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang<br>Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar oleh Dinas Sosial<br>Kabupaten Tegal.....                    | 75          |
| B. Dampak Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal terhadap Penanganan<br>Tuna Sosial dan Orang Terlantar Perspektif Maqasyid Syari'ah .....                                  | 84          |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>89</b>   |
| A. Kesimpulan.....  | 89          |
| B. Saran.....   | 91          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>92</b>   |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>GAMBAR SURAT IJIN PENELITIAN .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>GAMBAR WAWANCARA PENELITIAN .....</b>  | <b>xvi</b>  |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>  | <b>xvii</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|   |     |
|---|-----|
| Gambar 1. Peta Kabupaten Tegal.....   | 35  |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal .....              | 38  |
| Gambar 3. Bagan Alur Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang<br>Terlantar | 50  |
| Gambar 4. Pelayanan Pengajuan Rujukan ke Panti / Balai Rehabilitasi .....     | 55  |
| Gambar 5. Struktur Organisasi Rumah Singgah Trenggini .....                   | 82  |
| Gambar 6. Wawancara Kepada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial .....      | xii |
| Gambar 7. Wawancara Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial.....        | xii |

## DAFTAR TABEL

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Tabel 1. | Banyaknya Jumlah Pengemis, Gelandangan, dan Anak Terlantar di Kabupaten Tegal Tahun 2020.....                                  | 46 |
| Tabel 2. | Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pengemis, Gelandangan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2021 .....                         | 47 |
| Tabel 3. | Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2021 .....  | 47 |
| Tabel 4. | Layanan Kesehatan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022 ..  | 49 |
| Tabel 5. | Layanan Bimbingan Fisik dan Mental Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022 .....  | 50 |
| Tabel 6. | Bantuan Permakanan (Pangan Dasar) Pengemis, Gelandangan, dan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022 ..... | 52 |
| Tabel 7. | Layanan Ke Lembaga Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022 .....                                      | 54 |
| Tabel 8. | Layanan Reunifikasi Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022 ..  | 57 |
| Tabel 9. | Bimbingan Keluarga Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022 .....  | 58 |
| Tabel 8. | Layanan Reunifikasi Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022 ..  | 68 |
| Tabel 9. | Bimbingan Keluarga Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.....  | 70 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hingga saat ini, Indonesia tergolong Negara yang masih berkembang dan belum mampu mengentaskan masalah kemiskinan. Dari berbagai banyak masalah sosial yang ada hingga saat ini pengemis, gelandangan dan anak jalanan merupakan masalah yang harus di perhatikan lebih oleh pemerintah, karena saat ini masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki masalah pengemis, gelandangan dan anak jalanan hal ini tentu saja memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar, serta memperburuk kondisi sosial ekonomi daerah tersebut.

Menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal, pada tahun 2020 terdapat sekitar 266 orang pengemis, gelandangan dan anak jalanan yang termasuk kriteria tuna sosial dan orang terlantar tersebar di berbagai kawasan, seperti pasar, pusat kota, terminal, dan stasiun. Tidak hanya itu, terdapat pula sejumlah anak punk yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di jalanan. Mereka biasanya berasal dari keluarga miskin atau terlantar, yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau pekerjaan yang layak. Mereka seringkali

menjadi korban eksploitasi dan kekerasan, seperti perdagangan manusia, pelecehan seksual, dan pekerjaan paksa. Selain itu, pengemis dan anak jalanan juga rentan terhadap bahaya seperti penggunaan narkoba, kecanduan alkohol, dan penyakit menular.<sup>1</sup>

Hal ini menyebabkan banyak anak yang terpaksa menjadi pengemis atau menjalani kehidupan di jalanan sebagai tindakan survival. Selain itu, tidak sedikit pula yang memilih gaya hidup punk sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat.

Upaya penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kabupaten Tegal dilakukan melalui kegiatan sosial. program bantuan sosial seperti bantuan pangan dan perlindungan sosial juga memberikan tempat tinggal sementara berupa Rumah Singgah Trengginas yang berada dibawah dinas sosial Kabupaten Tegal. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut yaitu dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar.

*Maqashid As-syariah* berfungsi untuk melakukan dua hal yakni tahsil yaitu menggunakan manfaat (maslahat) dan kedua *Ibqa'* (mencegah kerusakan) atau mudharat dalam sosial masyarakat. Negara sejahtera menurut *As-syatibi* tidak boleh melanggar tujuan kemaslahatan sosial yaitu tujuan pemberdayaan manusia. *Maqashid*

---

<sup>1</sup> Alatas, S. F. (2012). Anak Jalanan: Tantangan Dan Solusinya. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, hlm. 222-235.

*Syariah* dalam kaitan negara sejahtera adalah daruriyat (kepentingan pokok atau primer manusia), *hajjiyat* (kepentingan sekunder), *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Assyatibi menyatakan Allah sebagai syar'i memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.<sup>2</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti seperti bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar perspektif *Maqasyid Syariah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana Dampak Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal terhadap Penanganan Tuna sosial dan Orang Terlantar ditinjau dari Perspektif *Maqasyid Syari'ah* ?

---

<sup>2</sup> Hamdani, "Negara Sejahtera dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah" Vol. 14, No.1, Maret 2020

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan, hal ini dilakukan agar bisa menjadi acuan untuk setiap kegiatan yang dilakukan.

Tujuan dan Kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal
- b. Untuk mengetahui bagaimana Dampak Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal terhadap Penanganan Tuna sosial dan Orang Terlantar ditinjau dari Perspektif *Maqasyid Syari'ah*

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

#### 1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara di Indonesia dalam pembahasan mengenai implementasi perda kabupaten Tegal nomor 4 tahun 2023 tentang penanganan tuna sosial dan orang terlantar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain yang

akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai implementasi perda kabupaten Tegal nomor 4 tahun 2023 tentang penanganan tuna sosial dan orang terlantar.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam mengevaluasi penanganan tuna sosial dan orang terlantar di Kabupaten Tegal.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian yang ditullis oleh penulis, ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penulisan penelitian lain yang hamper berkaitan dengan tuna sosial dan orang terlantar, referensi tersebut yaitu;

**Pertama**, Skripsi karya Zuffa Himmah Alfikril Hidayah dengan judul “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksana Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta )”. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menganalisis permasalahan dengan menggabungkan data primer dan data sekunder yang ada. Penulis menggunakan beberapa teori diantaranya yaitu; Teori Hak Asasi Manusia, Teori Kesejahteraan, Teori Perlindungan Hukum, Teori

Perlindungan Sosial, dan Teori *Al-Maqasyid As-Syaria'ah*. Penelitian ini membahas mengenai Dinas Sosial DIY memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap para gelandangan dan juga pengemis setelah Razia atau penertiban di jalanan sebagai upaya koersif dan memberikan program jaminan sosial sebagai upaya preventif.<sup>3</sup>

**Kedua,** Skripsi karya Retni Setyawanti dengan judul “Implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul) Perspektif Masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Isi dari penelitian ini yaitu Dinas Sosial perlu memahami adanya Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan pengemis. Hal ini bertujuan agar program kerja yang telah direncanakan oleh Dinas Sosial dapat Berjalan dengan baik.<sup>4</sup>

**Ketiga,** Skripsi karya Firda Widya Ningrum dengan judul “Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis (Studi Dinas Sosial Kabupaten Sleman). Penelitian ini menggunakan teori *Maqasyid al-syari'ah*, teori kebijakan Publik dan

---

<sup>3</sup> Zulfa Himmah Al-Fikri Hidayah, “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksana Peraturann Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta). *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017)

<sup>4</sup> Retni Setiyawanti, “Implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul) Perpspektif *Maslahah*. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017)

Teori Efektivitas Hukum. Inti dari penelitian ini yaitu dalam persoalan penanganan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman masih membutuhkan efektivitas kinerja dari Dinas Sosial, tercapai atau tidaknya tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam penanganan gelandangan dan pengemis.<sup>5</sup>

**Keempat**, skripsi karya Andi Resky Firadika dengan judul “Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa). Inti pembahasan dalam penelitian ini adalah upaya penanganan Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam menangani anak terlantar belum sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat karena anak terlantar di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 masih ada yang belum terlayani dan terpelihara oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan kurangnya APBN dan APBD, kurangnya pekerja sosial, dan kurangnya pendekatan awal pada saat melakukan pendataan.<sup>6</sup>

**Kelima**, jurnal karya Arohmat Hidayat, Dadan Kurniansyah, dan Evi Priyanti dengan judul “Efektivitas Program Penanggulangan dan Pemberdayaan Dinas Sosial dalam Mengatasi Gelandangan “. Inti dari pembahasan karya tersebut yaitu, penanganan untuk mengatasi

---

<sup>5</sup> Firda Widya Ningrum “Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis (Studi Dinas Sosial Kabupaten Sleman)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

<sup>6</sup> Andi Resky Firadika “Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (2017).

gelandangan di Kabupaten Karawang belum bisa dikatakan, efektif hal ini dikarenakan Dinas Sosial terkendala dengan jumlah Sumber daya manusia yang ada kurang, hal ini berdasarkan data yang diperoleh bahwa berdasarkan data sampai dengan bulan agustus 2019.<sup>7</sup>

**Keenam,** jurnal karya Maryatun dan Soni Akhmad Nulhaqim dengan Judul “ Peran Pimpinan Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) Mardi Utomo Dalam Upaya Rehabilitasi dan Pemberdayaan Untuk Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”. Inti dari pembahasn jurnal ini yaitu, panti pelayanan sosial di bidang kesejahteraan sosial pengemis dan gelandangan mampu berperan baik dalam aspek penerimaan, kreatif, demokrasi kepercayaan,dan pembuatan keputusan dalam upaya pemberdayaan sehingga program yang dijalankan mampu berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

**Ketujuh,** Jurnal karya Ricky Peryanto dengan Judul “ Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis “. Into pembahasan dari jurnal ini yaitu untuk menangani masalah ketertiban sosial dan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan dengan dikeluarkannya

---

<sup>7</sup> Arohmat Hidayat, dkk, “Efektivitas program penanggulangan dan pemberdayaan dinas sosial dalam mengatasi gelandangan”, Jurnal Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa, Karawang, Vol.13 No.3 (2021).

<sup>8</sup>Maryatun dan Soni Akhmad Nulhaqim,“Peran Pimpinan Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) Mardi Utomo Dalam Upaya Rehabilitasi dan Pemberdayaan Untuk Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”, Jurnal *social work*, Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran, Vol.10 No.2

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Dalam implementasinya, usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dijelaskan dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tersebut dengan mengupayakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi gelandangan dan pengemis.<sup>9</sup>

Dari beberapa penelitian skripsi maupun jurnal yang telah penulis uraikan di atas, Penelitian sebelumnya belum memberikan fokus khusus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar dari perspektif Maqasid Syariah. Dalam penelitian sebelumnya, belum secara khusus menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*.

Penelitian ini akan melibatkan evaluasi terhadap kepatuhan peraturan daerah dalam memenuhi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang penanganan tuna sosial dan orang terlantar yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dalam konteks kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

---

<sup>9</sup> Ricky Peryanto, "Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis ". Jurnal Demomkrasi dan Otonomi Daerah, FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya, Pekanbaru, Vol.16, No.3, (2018).

## F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisah bedah analisis yang digunakan untuk membuat karya ilmiah berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam karya ilmiah yaitu :

### 1. Teori *Maqasyid Syari'ah*

*Maqasid* merupakan bentuk plural (*jama'*) dari *maqasid* yang berasal daripada kata *qasada* yang bermaksud menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan.<sup>10</sup> Sedangkan *al-Syari'ah* berasal daripada kata *syara'a* yang bermaksud jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan . Oleh karena itu, secara terminologi *maqashid syari'ah* boleh dartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah SWT) dalam menggariskan ajaran atau syari'at Islam. Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk ke dalam kategori kebutuhan daruriyyah ini, yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic. London: MsDonald & Evan Ltd, 1980, hlm. 767.

<sup>11</sup> Abdurahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat". Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, STAIN Kudus, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan konsep *maqashid syari'ah* kesejahteraan atau kemashlahatan dibangun dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan cara mengembangkan pikiran secara ilmiah. Untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi yang lebih baik yang mampu memelihara kesejahteraan sosial masyarakat.

Perda Kabupaten Tegal nomor 4 tahun 2020 tentang penanganan tuna sosial dan orang terlantar merupakan wujud dari *maqashid syari'ah* yaitu memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*) karena mereka mengarahkan berbagai upaya melalui pengembangan individu melalui kelembagaan.

## **2. Teori Kebijakan Publik**

Teori kebijakan publik merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami proses pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar. Beberapa teori kebijakan publik yang relevan dapat digunakan sebagai landasan dalam menganalisis implementasi peraturan tersebut. Salah satu teori kebijakan publik yang dapat diterapkan yaitu Teori Implementasi Kebijakan yang berfokus pada analisis mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, teori implementasi kebijakan dapat membantu dalam memahami hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020. Teori ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Selain itu, penelitian lapangan juga mempelajari mengenai latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat..

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis yaitu memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Tegal yang berlaku dengan kebijakan dinas sosial. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalah yang akan diteliti, kemudian menganalisis data yang telah

diperoleh dari penelitian dan menyimpulkan sesuai dengan permasalahan

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan yang berkaitan dengan peraturan pemerintah daerah.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang penanganan tuna sosial dan orang terlantar, dan data yang diperoleh secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

- 1) Peraturan Bupati Tegal No 75 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar
- 2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Tuna Sosial
- 3) Data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal,, dan internet yang yang mendukung data penelitian. buku, karya imiah, hasil wawancara dan sebagainya

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan

oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah pihak-pihak yang berkaitan seperti Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tegal, serta pihak nyang berkaitan langsung dengan Rumah Singgah Trengginas sebagai panti untuk Tuna Sosial dan Orang Terlantar sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang

berkaitan dengan kebijakan Dinas Sosial dalam penanganan tuna sosial dan orang terlantar.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, letak geografis. Misalnya menyangkut jumlah penduduk Tuna Sosial an orang terlantar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan penyimpanan informasi. Metode ini diperlukan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil dari penelitian ini yaitu berupa *recording* ataupun foto.

a. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi bagi suatu permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan

kesimpulan berdasarkan peristiwa konkrit dan fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan baru yang bersifat umum.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Di dalam bab ini menjelaskan mengenai sub bab pembahasan diantaranya yaitu : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi teori sebagai landasan untuk mencari rumusan masalah yang akan diteliti. teori dan permasalahan yang akan diteliti dalam dalam penanganan tuna sosial dan orang terlantar menggunakan teori kebijakan public dan perspektif *Maqasyid Syari'ah*.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum Kabupaten Tegal berisi letak geografis, dan jumlah penduduk. Dinas Sosial Kabupaten Tegal terdiri visi dan misi, struktur organisasi, program kerja dinas sosial dalam penanganan tuna sosial dan orang terlantar meliputi faktor pendukung, dan penghambat dan bentuk-bentuk penanganan tuna sosial dan orang terlantar yang dilaksanakan oleh dinas sosial dalam

perda Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang terlantar

Bab keempat, berisi pembahasan hasil dari penelitian. Di dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang terlantar. Selain itu, peneliti juga akan mengaitkan kebijakan dinas sosial dengan peraturan daerah kabupaten Tegal nomor 4 tahun 2020 mengenai tuna sosial dan orang terlantar dengan Teori kebijakan Publik dan perspektif *Maqasyid Syari'ah*

Bab kelima, yaitu penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu terdapat pula saran untuk Lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian serta memuat daftar Pustaka yang berisi referensi yang terkait dalam penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang terlantar Perspektif Maqasyid Syari’ah” yaitu sebagai berikut :

1. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 4 Tahun 2020 tentang tentang penanganan tuna sosial dan Orang Terlantar memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya penanganan dan rehabilitasi sosial terhadap pengemis, gelandangan, dan anak jalanan. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 4 Tahun 2020 tentang penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar memberikan kerangka hukum yang mengatur secara khusus upaya pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap tuna sosial dan orang terlantar di Kabupaten Tegal. Peraturan ini merupakan landasan penting dalam menjalankan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Implementasi kebijakan ini masih perlu ditingkatkan. Terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program-program pembinaan yang seharusnya memberikan manfaat konkret bagi target populasi. Selain itu, sinergi dan koordinasi yang optimal antara Dinas Sosial Kabupaten Tegal, instansi pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat juga perlu diperkuat.

2. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal penanganan tuna sosial dan orang terlantar dari perspektif *Maqasid Syari'ah* menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Dengan pendekatan rehabilitatif, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap harta, jiwa, pikiran, keturunan, dan agama mereka. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip *Maqasid Syari'ah*, yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta melindungi dan mempromosikan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal berfokus pada aspek *hifz al-nafs* (melindungi jiwa) dengan memberikan perlindungan, bantuan kesehatan, dan rehabilitasi fisik dan mental. Selain itu, melalui program pembinaan keluarga, mereka juga menjaga aspek *hifz al-aql* (melindungi pikiran) dengan memberikan pendidikan, bimbingan, dan pemberdayaan kepada individu dan keluarga yang terkena dampak. Lebih lanjut, kebijakan ini juga berupaya melindungi *hifz al-mal* (melindungi harta) dengan memberikan bantuan pangan dasar, akses ke fasilitas dan sumber daya yang diperlukan, serta pelatihan keterampilan yang dapat membantu pengemis, gelandangan, dan anak jalanan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Selain itu, melalui program-program reintegrasi dan reunifikasi, kebijakan ini juga berkontribusi pada *hifz al-nasl* (melindungi keturunan) dengan

memastikan anak-anak terlantar mendapatkan pendidikan, asuhan, dan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan mereka.

## **B. Saran**

Perlu adanya peninjauan dan pembaruan kebijakan di Dinas Sosial Kabupaten Tegal agar dapat menyediakan program pembinaan yang lebih spesifik dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan serta rehabilitasi tuna sosial dan orang terlantar di wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Maidahh (5) : 6

Al-Maidah (5):48

### 2. Buku

Abdullah Nasih Ulwan. (1992). Hukum Yang Abadi (Diterjemahkan oleh Daud Rasyid). Jakarta: Usamah Press.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. (Maret 2017). Maqasyid Syariah. Jakarta: Amzah.

Bakri, A. J. (1996). Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Syatibi (Edisi 1, Cetakan 1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djamil, Fathurrahman. (1997). Filsafat Hukum Islam. Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Duski, Ibrahim. (2019). Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid). Ar-Ruz Media.

Husain Jauhar, A. A.-M. (Maret 2017). Maqasyid Syariah. Jakarta: Amzah.

Jasser Auda. (2011). Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sidiq, Ghofar. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. Jurnal Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, 44(18), Juni-Agustus.

Subarsono, A.G. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wehr, H. (1980). A Dictionary of Modern Written Arabic. London: MacDonald & Evans.

Zubaedi. (2007). Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Ar-Ruz Media.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat (1).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia, Bab I Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat (12) Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat (10).

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat (29) Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018, Pasal 15 Ayat (3) Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat (18) Tentang Penanganan Pengemis dan Orang Terlantar.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat (19) Tentang Penanganan Pengemis dan Orang Terlantar.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat (29) Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 14 Ayat (1) Tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat (30) Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018, Pasal 10 Ayat (2) Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

### **4. Skripsi**

- Erni, S. (2017). Implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul) Perspektif Masalah. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Firadika, A. R. (2017). Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Firadika, A. R. (2017). Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Himmah, A.-F. Z. (2017). Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksana Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014). Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kasi, A. (2014). Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 57.
- Ningrum, F. W. (2019). Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis (Studi Dinas Sosial Kabupaten Sleman). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Setiyawanti, R. (2017). Implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul) Perspektif Masalah. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## 5. Jurnal

- Abdurahman Kasdi. (2014). Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, STAIN Kudus.
- Alatas, S. F. (2012). Anak Jalanan: Tantangan Dan Solusinya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, hlm. 222-235.
- Galuh Nasrullah Kartika dkk. (2014). Konsep Maqasyid al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 54.
- Hamdani. (2020). Negara Sejahtera dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah. Vol. 14, No. 1.

- Hidayat, A., & dkk. (2021). Efektivitas Program Penanggulangan dan Pemberdayaan Dinas Sosial dalam Mengatasi Gelandangan. *Jurnal Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Singaperbangsa Karawang*, Vol. 13 No. 3.
- Muhammad Khalid Mas'ud. (1995). *Shatibi's of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, hlm. 157-159.
- Muhammad Sabir, Abdul Muher. (2021). *Maqashid Syariah dan metode penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)*. IAIN Parepare, Vol. 17, No. 1, Juni.
- Nulhaqim, S. A., & Maryatun, M. (2020). Peran Pimpinan Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) Mardi Utomo Dalam Upaya Rehabilitasi dan Pemberdayaan Untuk Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). *Jurnal Social Work, Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Fisip Universitas Padjajaran*, Vol. 10 No. 2.
- Peryanto, R. (2018). Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 18, No. 3, FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Pekanbaru.
- Shah, A. M., Hasan, M. K., & Ahmed, S. (2017). *Maqasid Al-Shariah: Panduan untuk Pemula*. *International Journal of Social Economics*, 481-495.
- Sidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung*, 44(18).
- Joko Sulistyono. (2019). Implementasi Program Kerja Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Bina Mulia*, Vol. 5, No. 2, hlm. 15.

## 6. Internet

- Andika. (n.d.). Rumah singgah siap tampung orang terlantar. Diakses pada 07 Maret 2023, dari <https://www.google.com/url?q=https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-04119538/rumah-trengginas-siap-tampung-orang-telantar&sa=U&ved=2ahUKEwjGsPO6gvP7AhV6T2wGHRmMDm0QFn0ECAEQAg&usg=AOvVaw0T81t6HGP-e5C5aUq8XJ05>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Data Gelandangan dan Anak Jalanan. Diakses pada 28 Maret 2023, dari <https://www.kemensos.go.id/modules.php?name=News&lang=id&sid=18306>

Sihombing, F. (2019). Perjuangan Gelap Para Gelandangan untuk Menjadi Manusia. Diakses pada 28 Maret 2023, dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4068004/perjuangan-gelap-para-gelandangan-untuk-menjadi-manusia>

UNICEF Indonesia. (2021). Anak Terlantar dan Anak di Jalanan. Diakses pada 28 Maret 2023, dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/anak-terlantar-dan-anak-di-jalanan>

Tegal Kabupaten. (2023). Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Resmikan Rumah Singgah Trengginas. Diakses pada 07 Maret 2023, dari <https://dinsos.tegalkab.go.id/berita/detail/sekretaris-daerah-kab-tegal-resmikan-rumah-singgah-trengginas>

## 7. Wawancara

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Makmur, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tegal, tanggal 14 Maret 2023.

Wawancara bapak Arif Triyono, staff Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tegal, tanggal 24 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Ali Mahmudin, Staf Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tegal, tanggal 24 Februari 2023.

Wawancara dengan bapak Makmur, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tegal, tanggal 14 Maret 2023.

## 8. Data Lain

Data Dinas Sosial "*Jumlah Pengemis, Gelandangan, dan Anak Terlantar di Kabupaten Tegal Tahun 2020 oleh Dinas Sosial*"

SPM Rehabsos "7 Layanan Ke Lembaga Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022" Data oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

SPM Rehabsos "Bantuan Permakanan (Pangan Dasar) Pengemis, Gelandangan, dan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022" Data oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

SPM Rehabsos "Bimbingan Keluarga Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022" Data oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

SPM Rehabsos "Layanan Bimbingan Fisik dan Mental Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022" Data oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

SPM Rehabsos "Layanan Kesehatan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun" Data Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal" Data Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

SPM Rehabsos "Layanan Reunifikasi Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022" Data Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

SPM Rehabsos "Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pengemis, Gelandangan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2021" Data oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

SPM Rehabsos "3 Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2021" data oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

